

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan potensi sumber daya alam, adat istiadat, bahasa, dan perkembangan intelektual (Risa, et al, 2022). Kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya yang berlimpah tentu berpotensi untuk dijadikan objek wisata yang menarik bagi wisatawan. Pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*), maka pengembangan pariwisata harus dilakukan dalam kesatuan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan 2 lainnya (Andi, 2004 dalam Handayani & Warsono, 2017) Selain itu, pengembangan pariwisata secara optimal mampu memacu pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah, seperti tersedianya lapangan pekerjaan, meningkatnya taraf hidup dan aktifnya industri-industri lain. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan daerah memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki. dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, maka daerah diberi kewenangan untuk mandiri dalam mengelola sumber dayanya dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. salah satunya adalah dalam hal pengelolaan objek pariwisata, dimana dalam

pengembangan pariwisata, pemerintah daerah dan pusat sama-sama punya andil.

Pariwisata merupakan salah satu aspek penting dalam suatu usaha wilayah. Bila dikelola dengan baik dan tepat maka akan menjadi potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, untuk itu diperlukan peran pemerintah untuk mengembangkannya pengelolaan pariwisata harus merupakan pengelolaan atau pengembangan yang terencana secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dalam segi ekonomi, sosial dan cultural (Sulastri,2017). Analisis *stakeholder* merupakan kunci untuk mengidentifikasikan masalah yang dapat dan harus dipecahkan dalam konteks perubahan kebijakan yang efektif khususnya dalam situasi dimana tidak ada seorangpun yang memegang kendali penuh, tetapi banyak pihak yang terlibat, terpengaruh atau memiliki sebagian tanggung jawab untuk bertindak. Kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* yang hadir dan terlibat selama proses pengambilan keputusan cenderung menghasilkan strategi yang lebih kuat dan sah dibandingkan kolaborasi yang terdiri dari kelompok *stakeholder* homogen. Freeman (1984) dalam Reed et al., (2009) berpendapat bahwa karya penting mengenai teori pemangku kepentingan yang membedakan antara mereka yang mempengaruhi atau terkena dampak suatu keputusan atau tindakan (kadang-kadang disebut sebagai pemangku kepentingan aktif dan pasif dalam literatur pemangku kepentingan sumber daya alam.

Pariwisata lokal merupakan potensi wisata yang dimiliki setiap daerah, baik yang berupa wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dan juga pariwisata lokal dapat memberikan manfaat yang besar bagi daerah yang berusaha mengembangkan wisatanya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap daerah mempunyai berbagai potensi wisata lokal yang akan digali, diolah, dikelola serta dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya terhadap sarana hiburan atau sarana rekreasi. Pengembangan pariwisata lokal selain dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah, juga dapat memberikan keuntungan baik secara ekonomi maupun non ekonomi (Mulyadi dalam Sulastri 2017).

Terdapat 35 Kota/Kabupaten yang ada di provinsi Jawa Tengah salah satunya yaitu Kabupaten Rembang. Rembang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Rembang. Kabupaten ini berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat. Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan pesisir pantai di bagian utaranya. Luasnya kawasan pesisir pantai ini mendukung lahirnya berbagai objek wisata yang mengusung tema pariwisata bahari. Dengan munculnya berbagai objek wisata tersebut akan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rembang. Tentunya, hal tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang. Berdasarkan

data yang peneliti temukan, akumulasi kunjungan dari wisatawan di Kabupaten Rembang menempati peringkat sepuluh besar bersama dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah pada kurun waktu 2021 – 2023.

Tabel 1.1 Sepuluh Kabupaten/Kota yang Memiliki Akumulasi Kunjungan Wisatawan Tertinggi di Jawa Tengah (2021-2023).

Kab/Kota	2021	2022	2023	Jumlah
Klaten	1.628.177	4.816.082	6.457.057	12.901.316
Banyumas	1.498.236	2.626.837	3.526.655	7.651.728
Semarang Kota	2.670.358	577.961	3.626.307	6.874.626
Magelang	863.857	2.593.175	3.342.341	6.799.373
Temanggung	254.969	5.343.141	554.993	6.153.103
Semarang Kab	1.285.587	1.241.210	3.534.130	6.060.927
Tegal	431.523	3.810.858	944.344	5.186.725
Demak	858.375	1.575.712	2.745.040	5.179.127
Rembang	871.136	2.249.579	1.846.134	4.966.849
Banjarnegara	1.167.841	1.748.969	1.779.430	4.696.240

Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, 2023
& Diolah oleh peneliti.

Tingginya kunjungan wisatawan di Kabupaten Rembang melonjak pada tahun 2022 yang merupakan masa setelah adanya pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang memiliki potensi yang cukup menjanjikan dalam sektor pariwisata.

Kabupaten Rembang memiliki 16 wisata alam yang aktif dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Rembang maupun masyarakat setempat. Kabupaten Rembang sangat dikenal dalam wisata pesisir atau pantainya, salah satunya yaitu Taman Rekreasi Pantai Kartini. Peneliti memilih lokus di Taman Rekreasi Pantai Kartini di Kabupaten Rembang karena Taman

Rekreasi Pantai Kartini merupakan salah satu tempat wisata yang potensial di Jawa Tengah. Dengan keindahan alam dengan latar belakang pemandangan laut bisa digunakan tujuan rekreasi, taman yang luas, adanya fasilitas seperti kolam renang, flying fox, outbound kid, kebun binatang mini, istana bola, banana boat, dan permainan anak lainnya (jatengreport.com) serta sejarah yang melatarbelakangi tempat ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik jika dapat dikelola dengan baik, sehingga peneliti tertarik untuk memilih lokus di Taman Rekreasi Pantai Kartini. .



Gambar 1.1 Jumlah Kunjungan Taman Rekreasi Pantai Kartini

Sumber : Data Buku Pariwisata Jateng 2022 & Diolah oleh peneliti

Berdasarkan data dari Buku Saku Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, 2021 dan 2022. Pada tahun 2020 tidak ada wisatawan asing yang datang ke Taman Rekreasi Pantai Kartini namun terdapat 17.374 jiwa

wisatawan nusantara yang datang, pada tahun 2021 tidak ada wisatawan asing yang datang ke Taman Rekreasi Pantai Kartini namun terdapat 9.952 jiwa wisatawan nusantara yang datang, pada tahun 2022 tidak ada wisatawan asing yang datang ke Taman Rekreasi Pantai Kartini namun terdapat 12.700 jiwa wisatawan nusantara.

Minimnya peminat terhadap Taman Rekreasi Pantai Kartini juga dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tempat tersebut sudah tidak menarik lagi atau tidak pantas karena tertinggal dari tren pasar populer saat ini. Beberapa bangunan/objek wisata sudah tidak layak untuk dikunjungi, banyak yang rusak dan terbengkalai, seperti banyak wahana yang roboh, berkarat, rapuh dan tidak dapat digunakan karena jarang digunakan.



Gambar 1. 2 Sampah di Sekitar Pantai

Sumber : Dokumentasi peneliti

Berdasarkan gambar 1.2 di atas, banyak nya sampah yang berserakan di area pantai menjadi salah satu penyebab sepi nya wisatawan yang datang ke Taman Rekreasi Pantai Kartini. Ranting dan batang pohon serta sampah manusia yang ada di sekitar pantai sangat mengganggu pemandangan.



Gambar 1. 3 Fasilitas Umum Rusak

Sumber : Dokumentasi peneliti

Berdasarkan gambar 1.3 kondisi tak terawat juga dapat dilihat di area jembatan yang berada di pinggir pantai. Sekarang pembatas jembatan sudah ada yang roboh. Puing-puingnya masih berserakan di sekitar. Kayu-kayunya terlihat lapuk. Di ujung jembatan tersebut terdapat beberapa bangunan seperti gazebo yang mana kondisinya juga ada yang rusak dan alasnya sudah jebol.



Gambar 1. 4 Kios Rusak dan Terbengkalai

Sumber : Dokumentasi peneliti

Berdasarkan gambar 1.4 di atas kios yang seharusnya dapat membantu masyarakat rembang untuk berpenghasilan pun juga terbengkalai karena sepi nya pengunjung yang datang.



Gambar 1. 5 Kebun Binatang Terbengkalai

Sumber : Dokumentasi peneliti

Berdasarkan gambar 1.5 kawasan yang dulu nya kebun binatang yang seharusnya bisa ditempati oleh satwa sekarang terbengkalai dan rimbun oleh tanaman liar.

Pertama, dilansir dari berita harian Suaramerdeka.com yang ditulis oleh Djamal AG pertanggal 31 Maret 2018 dengan judul artikel “Pemkab Rembang Akhiri Kerja Sama dengan CV Rembang Jaya Sentosa” Melihat dari sumber yang sudah dijelaskan Pemerintah Kabupaten Rembang mengakhiri kontrak kerja sama pengelolaan objek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini dengan CV Rembang Jaya Sentosa per, Sabtu 31 Maret 2018. Namun pengelola itu diminta melunasi utang yang merupakan kekurangan setoran tahun lalu dan tahun ini. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rembang, Karsono, mengatakan kontrak kerja CV Rembang

Jaya Sentosa menyangkut pengelolaan objek wisata itu semestinya baru akan berakhir pada 31 Desember 2018.

Kedua, dilansir dari berita harian Redaksi Suara Baru yang di tulis oleh Djamal A Garhan pertanggal 20 Juni 2019 dengan judul artikel "Pekab Rembang Tawarkan Taman Rekreasi Pantai Kartini ke Investor". Melihat pada sumber yang sudah dijelaskan, tempat wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini (TRPK) Rembang, Jawa Tengah, milik Pemerintah Kabupaten (Pekab) setempat, butuh penanganan serius. Persoalannya, kontrak pengelolaan tempat wisata itu dengan PT Mantingan Karya Aditya (MKA) sudah habis sejak 9 Juni 2019 pengelola TRPK yang merupakan kepercayaan PT MKA, Sriyono, mengaku belum bisa memastikan apakah PT MKA akan memperpanjang kontrak atau tidak. Masalahnya, Komisaris Utama PT MKA, Tri Supritoyo yang berdomisili di Jakarta sedang sakit. "Sampai sekarang saya belum bisa berkomunikasi dengan Mas Toyo (panggilan komisaris itu) Dijelaskan, kontrak TRPK berlangsung pada tahun 2018, dengan nilai kontrak Rp 700 juta bayar di depan. Sementara untuk membenahi wahana di TRPK, PT MKA telah menghabiskan dana Rp 1,2 milyar. "Jika dihitung dengan jumlah pemasukan dikurangi dengan pengeluaran, hasilnya masih minus Rp 800 juta. Itu sebabnya, Sriyono mengaku tidak tahu apakah PT MKA masih akan memperpanjang kontrak atau berhenti kontrak. Sementara dari Pekab Rembang sudah memberikan sinyal, jika diperpanjang harga kontraknya dinaikkan menjadi Rp 1 milyar. Pemerhati masalah sosial di Rembang, Sriyanto, mengatakan penetapan

harga kontrak TRPK sebesar Rp 1 milyar dinilai terlalu tinggi. Pasalnya, selain tempat wisata itu minim fasilitas, sekarang di desa-desa banyak bermunculan tempat wisata baru. Sehingga cukup berat bagi pengontrak jika harus membayar biaya kontrak Rp 1 milyar.

Ketiga, dilansir dari berita harian Radar Kudus yang ditulis oleh Abdul Rokhim pertanggal 15 Maret 2023 yang berjudul “Putusan Kasus Korupsi Retribusi Taman Kartini Rembang: Pelaku Dibui Setahun, Bayar Uang Pengganti Rp 113 Juta”. Melihat dari sumber yang sudah dijelaskan Mohamad Ridwan telah resmi menyandang status terpidana kasus korupsi retribusi Taman Rekreasi Pantai (TRP) Kartini. Ia dijatuhi hukuman penjara satu tahun dan membayar uang pengganti Rp 113.212.500. Ia terjerat dugaan kasus tindak pidana korupsi penggelapan retribusi Taman Rekreasi Pantai (TRP) Kartini tahun anggaran 2019 sampai 2021. Dengan total kerugian negara sekitar Rp 113 juta.

Keempat, dilansir dari berita harian Lingkarjateng.id yang ditulis oleh R. Teguh Wibowo pertanggal 01 Agustus 2023 yang berjudul “Gagal di Revitalisasi, Taman Rekreasi Pantai Kartini Terbengkalai”. Melihat dari sumber yang sudah dijelaskan Taman rekreasi pantai Kartini atau yang sering disebut Taman Kartini gagal di revitalisasi pada tahun ini. Kondisinya pun sangat memprihatinkan, sejumlah fasilitas umum seperti kebun binatang mini dunia fantasi Jurassic Park dan dermaga kayu terbengkalai setelah tinggalkan pengolah pihak ketiga. Sejumlah bangunan di lokasi wisata pelat merah itu banyak yang rusak seperti pada bangunan

kios-kios yang berada di sebelah selatan bagian dalam atapnya ada yang sudah ambrol kemudian bangunan untuk tempat satwa kondisinya rusak dan kumuh. Fasilitas lain seperti mushola dan kamar mandi terkesan kurang terawat bahkan jetty dermaga nya sudah tidak ada, beton tiang penyangga dan alasnya runtuh kalinya juga telah terlihat.

1.2 RKA di Taman Rekreasi Pantai Kartini Tahun 2023

Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
	Koefisien	Satuan	Harga	
Pengembangan Daya Tarik Wisata TRP Kartini	1 Paket	Paket	9.590.000.000	Rp. 9.590.000.000
Tenaga Kebersihan	18 Orang x 284 Hari	O	65.000	Rp. 37. 800.000

Sumber : RKA Dinbudpar, 2023 & Dioleh Peneliti

Kelima, dilansir dari berita harian Suaramerdekamuria.com yang ditulis oleh R. Ilyas al-Musthofa pertanggal 7 Agustus 2023 yang berjudul “Rembang Hari Ini : Sekda Sentil Kepala Dinbudpar Soal Kondisi Taman Kartini, Bakal Segera Dipanggil”. Melihat dari sumber yang sudah dijelaskan usai sejumlah fasilitas dan aset Taman Kartini Rembang yang rusak dan terbengkalai, terungkap fakta baru. Ternyata, sebagai pengelola, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar) belum pernah melaporkan kondisi terkini Taman Kartini ke Bupati Rembang melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Hal itu diungkapkan Sekda Rembang Fahrudin, menanggapi makin banyaknya fasilitas wisata dan aset Taman Kartini yang rusak dan terbengkalai.

Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa kurangnya komunikasi antar *stakeholder*, kurangnya kerjasama antar *stakeholder*, adanya kritik untuk

stakeholder pengelola karena kurangnya inovasi membuat kekhawatiran terhadap kepuasan pengunjung karena minimnya inovasi, pemutusan kontrak pihak swasta dengan Pemkab Rembang, serta peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan pihak swasta yang belum optimal hingga akhirnya Taman Rekreasi Pantai Kartini gagal direvitaliasi dan terbengkalai.

Pengelolaan hubungan yang efektif tidak akan berhasil tanpa menggunakan analisis *stakeholder* yang dilakukan secara hati-hati. analisis *stakeholder* dapat membantu manajer publik untuk menemukan *stakeholder* utama dan apa yang dapat memuaskan mereka, dengan tujuan untuk menciptakan nilai publik dan memajukan kebaikan bersama (Eko, et al, 2023). Analisis *stakeholders* kini semakin populer di berbagai organisasi di berbagai bidang, dan kini digunakan oleh para pembuat kebijakan, regulator, organisasi pemerintah dan non-pemerintah, dunia usaha, dan media (Friedman dan Miles, 2006) dalam Reed et al., (2009).

Berdasarkan masalah-masalah yang sudah dijelaskan, maka perlu adanya pemetaan mengenai siapa saja *stakeholders* yang terlibat dan apa saja peran yang harus dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* dalam pengelolaan objek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang. Sehingga pertanyaan yang akan dijawab pada penelitian ini adalah siapa saja *stakeholder* yang terlibat dan apa saja peran yang harus dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* dalam pengelolaan objek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk mengungkap pokok-pokok pikiran secara jelas mengenai hakikat dari masalah tersebut. Permasalahan tersebut telah diuraikan pada latar belakang sehingga terdapat beberapa rumusan permasalahan utama yang harus diatasi.

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Kurangnya komunikasi antar *stakeholder*
2. Kurangnya kerjasama antar *stakeholder*
3. *Stakeholder* pengelola mendapat kritik karena kurangnya inovasi dan kekhawatiran terhadap kepuasan pengunjung karena minimnya inovasi.
4. Pemutusan kontrak pihak swasta dengan Pemkab Rembang
5. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan pihak swasta yang belum optimal

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang
2. Bagaimana peran setiap *stakeholders* dalam usaha pengelolaan objek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian perlu diketahui maksud dan tujuan penelitian. tujuan penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan tentang apa yang akan dicapai oleh peneliti atas hasil penelitian. Sesuai perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang
2. Menganalisis peran *stakeholders* dalam usaha pengelolaan objek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dimaksud untuk menyatakan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktis

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam upaya pengembangan teori-teori ilmu sosial dan ilmu politik secara umum, dan pengembangan pada bidang administrasi publik pada khususnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Selain kegunaan akademis, penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan kegunaan, yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan sebagai wadah dalam menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti proses belajar di bangku kuliah.

2. Bagi *Stakeholder*

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemikiran untuk berperan serta memberi kontribusi dalam pengembangan objek wisata di Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bentuk informasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan objek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2

Penelitian Terdahulu

No	Judul/Peneliti dan Tahun	Metode/Teori	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan peneliti
1	ANALISIS PERAN <i>STAKEHOLDERS</i> DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI KARANG JAHE DI KABUPATEN REMBANG. Fitri Handayani dan Hardi Warsono. 2017	Deskriptif Kualitatif/ (Maryono et al.2005) <i>Stakeholders</i> dibagi menjadi 3 kelompok yaitu Primer, Kunci dan Sekunder atau penduduk	<i>Stakeholders</i> yang terlibat dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu <i>stakeholders</i> primer, kunci, dan sekunder. Badan pengelola Pantai Karang Jahe (BP KJB) dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) merupakan <i>stakeholders</i> kunci yang memiliki peran penting dalam pengembangan objek wisata tersebut. Sementara itu, <i>stakeholders</i> sekunder meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, aparat keamanan, dan pihak swasta. Pola kerjasama <i>stakeholders</i> dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe bersifat sukarela	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu terletak pada lokusnya, peneliti terdahulu berlokus di pantai karangjahe sedangkan peneliti berlokus di Taman Rekreasi Pantai Kartini

			dan mutualistik, dimana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Beberapa faktor yang menghambat para <i>stakeholders</i> dalam upaya mengembangkan objek wisata Pantai Karang Jahe termasuk lahan, anggaran, sumber daya manusia, pola pikir, regulasi, promosi pariwisata, dan kerjasama antar <i>stakeholders</i> .	
2	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020)	Deskriptif kualitatif, Arief Yahya yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bahwa pentingnya dorongan sistem kepariwisataan	berdasarkan konsep pentahelix, <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam pengembangan destinasi pariwisata halal di Pulau Penyengat terdiri dari Akademisi, Bisnis, Pemerintah, Komunitas dan Media Massa. Identifikasi <i>stakeholders</i> berdasarkan kategori <i>stakeholders</i>, terdiri dari <i>Stakeholders</i> Primer, <i>Stakeholders</i> Kunci, dan <i>Stakeholders</i> Sekunder. Peran <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam pengembangan destinasi pariwisata halal di Pulau Penyengat ada Policy creator, Koordinator,	Perbedaan nya terletak ada lokusnya, penelitian terdahulu berfokus dan lokus dalam pengembangan destinasi pariwisata halal di pulau penyengat sedangkan peneliti berfokus dan lokus dalam pengelolaan objek wisata di taman rekreasi pantai kartini kabupaten rembang

		melalui optimasi peran business (Bisnis), government (Pemerintah), community (Komunitas), academic (Akademisi), and media (Publikasi)	Fasilitator, Implementor dan Akselerator. Dari sekian peran, peran policy creator belum optimal dibuktikan dengan belum diterbitkannya peraturan mengenai pariwisata halal di Kota Tanjungpinang. Peran koordinator juga belum optimal karena tidak adanya koordinasi seluruh <i>stakeholders</i> oleh Disbudpar.	
3	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengembangan Pariwisata Siosar Ginting, G., Kismartini, K., Yuniningsih, T., & Afrizal, T. (2022)	Kualitatif Rahmi (dalam Alamsyah 2016) mengatakan dalam suatu pengembangan pariwisata ada tiga <i>stakeholder</i> yang sangat berperan penting, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa, Siosar mempunyai potensi wisata yang besar untuk dikembangkan. Memiliki banyak objek wisata yang berpotensi, sudah seharusnya <i>stakeholder</i> melakukan berbagai upaya dalam pengembangan kawasan wisata di Siosar. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam menjalankan perannya, <i>stakeholder</i> terkait belum melakukan perannya secara optimal. Masih ditemukannya ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan dengan yang	Perbedaannya penelitian terdahulu membahas pengembangan pariwisata siosar yang berlokus di Kabupaten Karo, Sumatera Utara sedangkan peneliti membahas pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini yang berlokus di kabupaten rembang

			seharusnya, baik dari Pemerintah, swasta dan masyarakat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terlihat belum memiliki andil besar, pihak swasta juga belum menyediakan fasilitas seperti yang diharapkan, dan masyarakat yang belum di libatkan dalam proses pengembangan kawasan wisata di Siosar.	
4	Analisis Peran <i>Stakeholder</i> Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung Cahyana, S., & Nugroho, S. (2019)	Kualitatif Suidana (2017) Para ahli sudah memperkirakan bahwa pariwisata yang lebih mementingkan kuantitas dimasa mendatang akan merugikan lingkungan seperti pencemaran, kerusakan ekosistem yang ada serta pembangunan yang	hasil dari analisis peranan <i>stakeholder</i> Desa Wisata Carangsari ini disimpulkan bahwa desa ini memiliki tiga pilar pariwisata yang aktif dalam melaksanakan keberlangsungan pariwisata, dengan adanya desa wisata masyarakat yakin keadaan ekonominya akan beranjak naik dari sebelumnya. Peran dari berbagai pilar yaitu pemerintah desa carangsari sudah melakukan program turunan dari pemerintah daerah yang menjadi salah satu aspek dalam memajukan pariwisata. pengusaha lokal yang dinilai sudah menjalankan	Penelitian terdahulu berlokus pada Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung sedangkan peneliti berlokus pada Taman Rekreasi Pantai Kartini.

		sangat banyak untuk menunjang praktik pariwisata massal	perannya dalam mengembangkan desa wisata dengan menciptakan usaha yang nantinya bisa menjadi salah satu promosi untuk ketertarikan wisatawan datang ke desa carangsari. masyarakat lokal telah diajak untuk mengambil keputusan dan mendapatkan hak untuk menerima ekonomi secara langsung dari kegiatan pariwisata.	
5	PERAN <i>STAKEHOLDERS</i> DALAM PENGEMBA NGAN PANTAI PULAU MERAH KABUPATEN BANYUWANGI SEBAGAI DESTINASI WISATA BAHARI Kurniawati, R. A.K., Shaherani, N., Coutrier, B. L. L., & Sukmawati, H. (2022)	Deskriptif Kualitatif Freeman et al., 2007 <i>stakeholders</i> dibagi menjadi dua fase, yaitu primer (terkait langsung dengan perusahaan) dan sekunder (tidak terkait langsung)	Diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan pembangunan Pantai Pulau Merah telah melibatkan sektor UMKM.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu penelitian terdahulu berlokus di Pantai Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi sedangkan peneliti berlokus di Taman Rekreasi Pantai Kartini.

6	The Role of <i>Stakeholders</i> in Agro-Tourism Development with MAXTOR Analysis Approach (Case Study in Catur Tourism Village of Bali Province, Indonesia) Aryawan, G., Sara, I. M., & Purnami, A. S. (2019)	Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksploratif yang bertujuan untuk memberikan makna dan pemahaman situasi masalah yang dihadapi peneliti. Arya et al., (2019) Pariwisata adalah aktivitas yang berkaitan dengan perjalanan rekreasi. Pemahaman umum mengenai pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu dari satu tempat ke tempat lain, meninggal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan yang mempengaruhi pengembangan agrowisata di Desa Catur adalah masyarakat lokal, petani lokal, pemerintah, dan pemerintah sektor swasta, dan lembaga pariwisata lokal.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu, penelitian terdahulu berlokus di Desa Catur Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli sedangkan peneliti berlokus di Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang.
---	---	---	---	---

		kan tempat asalnya dengan tujuan menikmati tempat yang dikunjungi, tanpa mencari nafkah di sana.		
7	Mapping <i>stakeholders'</i> roles in governing sustainable tourism destinations Roxas, F. M. Y., Rivera, J. P. R., & Gutierrez, E. L. M. (2020)	Analisis deskriptif Bramwell dan Lane (2000) menyebutkan bahwa pariwisata dianggap sebagai industri multi-pemangku kepentingan yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda.	Membuat gambaran tentang siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat, apa minat dan pengaruh mereka terhadap isu yang diteliti, serta bagaimana interaksi mereka dapat dilihat melalui analisis yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini dapat membantu dalam merencanakan strategi atau kebijakan yang lebih baik terkait dengan pariwisata dan pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir Terschelling.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu terletak di lokusnya, penelitian terdahulu membahas cara Memetakan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan secara luas, sedangkan peneliti menganalisis <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan objek wisata yang berlokasi di Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang.
8	PERAN <i>STAKEHOLDER</i> DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA KEBUN	Kualitatif (Nugroho, 2015) <i>Stakeholder</i> dimaknai sebagai individu,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran <i>stakeholder</i> dalam hal ini pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Kebun Raya	penelitian terdahulu berlokasi di objek wisata Kebun Raya Massenrempulu Enrekang sedangkan peneliti berfokus di Taman Rekreasi Pantai

	RAYA MASSENRE MPULU ENREKANG Sulastri. 2017	kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh kegiatan atau program pembangunan.	Massenrempulu Enrekang belum memuaskan, diperlukan sarana dan prasarana yang cukup modern untuk meningkatkan pengelolaan objek wisata tersebut.	Kartini Kabupaten Rembang.
9	IMPLEMEN TASI PERAN <i>STAKEHOLDER</i> DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI TAMAN NASIONAL MANUSULA (TNM) DI KABUPATEN MALUKU TENGAH. Yosefita. 2015	Deskriptif kualitatif Maryono et al.,(2005) <i>Stakeholder</i> diklasifikasi menjadi tiga yaitu satu <i>stakeholder</i> primer,ku nci dan ekunder	Pengelolaan dan pengembangan ekowisata di Taman Nasional Manusela hanya dilakukan oleh Balai Taman Nasional Manusela sebagai <i>stakeholder</i> kunci. Masyarakat lokal masih berperan pasif dan hanya sebagai pelaku usaha ekowisata, tanpa dilibatkan dalam perencanaan pengembangan. Pemerintah kabupaten tidak berkontribusi dalam pengelolaan ekowisata karena aturan menteri kehutanan tidak memberikan peran pengelolaan kepada pemerintah daerah.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu, penelitian terdahulu berlokus di Taman Nasional Manusela (TNM) Kabupaten Maluku Tengah sedangkan peneliti berlokus di Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang
10	ANALISIS PERAN	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan	Perbedaan penelitian terdahulu

<i>STAKEHOLDERS</i> DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ANGKA KEMATIAN IBU STUDI KASUS KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG Beny Setiawan, Herbasuki Nurcahyanto. 2020	Nugroho (2014) mengklasifikasi peran stakeholders antara lain : policy creator, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator	<i>stakeholder</i> Kunci adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang mempunyai peran sebagai policy creator, fasilitator, akselerator, dan koordinator. <i>Stakeholders</i> primer adalah Tenaga Kesehatan (Bidan) memiliki peran sebagai fasilitator, implementer, dan koordinator, IBI Kota Semarang, PKK Kecamatan Pedurungan dan FKK berperan sebagai fasilitator, implementator dan koordinator. <i>Stakeholders</i> Skunder terdiri dari Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, keluarga, Institusi pendidikan dan Dunia Usaha yang masing-masing berperan sebagai fasilitator.	dengan peneliti yaitu, penelitian terdahulu berfokus pada Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu dan berlokus di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sedangkan peneliti berfokus pada pengembangan objek wisata taman rekreasi pantai kartini dan berlokus di Kabupaten Rembang
--	---	--	---

Tabel 1.1 beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti untuk membuat suatu karya dalam menambah pengetahuan dalam teori maupun materi yang belum ada. Penelitian terdahulu ini juga digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan karya penelitian yang berkaitan dengan analisis *stakeholder*, peran aktor, serta mengenai pengelolaan objek wisata. Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui penelitian sebelumnya dengan permasalahan yang sama agar nantinya dapat diketahui kesenjangan penelitian yang dapat menjadi

fokus dari peneliti sebelumnya. Penelitian terkait pemetaan peran *stakeholder* dalam pengelolaan objek wisata pernah dilakukan beberapa penelitian dengan perbedaan dari setiap penelitiannya, pada penelitian terdahulu ini beberapa artikel terkait pemetaan peran *stakeholder* dalam pengelolaan objek wisata dapat dijadikan kajian dan berkembang secara keilmuan.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik terdiri dari kata administrasi dan publik. Kata administrasi berasal dari dua kata, *ad* dan *ministrare*, yang mempunyai makna membantu atau memberikan jasa. Dalam periode kekaisaran Romawi kata administrasi dihubungkan dengan tugas-tugas pelayanan. Pengertian atau definisi administrasi dapat disusun dari beberapa sudut pandang, yaitu proses, instrumen dan wilayah penerapannya.

Pengertian administrasi publik dirangkum oleh Syafiie (2017;24-26) dari beberapa tokoh diantaranya adalah Prajudi Atmosudirdjo yang mengatakan administrasi publik adalah administrasi negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan; Menurut Arifin Abdulrachman administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara; Menurut Dwight Waldo administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah; Menurut George J. Gordon mengatakan administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun

perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan; dan Menurut Marshall E. Dimock., Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig mengatakan administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam menjalankan kekuasaan politiknya.

Administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional (dalam Pasolong;2017:1). Menurut penjelasan mengenai teori administrasi publik dari beberapa ahli diatas, dapat dikaitkan dan disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu proses kegiatan pemerintah di dalam menjalankan kekuasaan politiknya yang mana memerlukan pemetaan peran *stakeholder* dalam pengelolaan objek wisata.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari perubahan atau pergeseran paradigma nya. Khun (dalam keban, 2014) menjelaskan bahwa paradigma adalah suatu kerangka pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar, atau cara penyelesaian masyarakat yang lainnya dalam periode waktu tertentu. Ketika suatu paradigma menghadapi krisis, kepercayaan kerangka pandang tersebut mulai menurun, mendorong masyarakat untuk mencari pandangan baru yang lebih sesuai dengan kondisi

saat itu. Dalam konteks ilmu administrasi publik, krisis paradigma ini menghasilkan pergeseran dari paradigma lama menuju yang baru.

Administrasi publik terus mengalami perkembangan yang mengakibatkan adanya pergantian paradigma lama menjadi baru. Menurut Nicholas Henry (1988) menyebutkan terdapat lima paradigma administrasi publik diantaranya :

1. Paradigma dikotomi politik administrasi (1900-1926).

Paradigma ini memandang ada perbedaan fungsi politik dan administrasi pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu perlu adanya pemisahan antara politik dan administrasi sebagai upaya dalam mencapai efisiensi dan efektivitas. Menurut Goodnow dalam Keban (2014) politik menitikberatkan perhatiannya pada kebijakan untuk memenuhi kehendak masyarakat, sedangkan administrasi dari paradigma ini yaitu administrasi harus menjadi bagian tersendiri dan dipisahkan dari pengaruh politik. Hal ini bertujuan agar administrasi terlepas dari keterikatan dengan unsur apapun sehingga dalam prosesnya dapat mencapai efisiensi dan efektivitas dalam birokrasi pemerintahan. Pada paradigma ini, aspek yang lebih ditekankan daripada fokusnya sedangkan fokus atau metode tidak dijelaskan secara menyeluruh.

2. Paradigma prinsip-prinsip administrasi (1927-1937)

paradigma yang kedua ini ditandai dengan terbitnya buku teks kedua dalam administrasi publik, karya willoughby berjudul *Principles of Public Administration*, pada 1927. Buku ini menegaskan bahwa ada prinsip-prinsip ilmiah tertentu mengenai administrasi yang dipengaruhi konsep manajerial atau yang dikenal dengan sebutan POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting).

3. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)

Paradigma ini muncul setelah adanya pertentangan dari kalangan ilmuwan politik yang mengkritik bahwa politik dan administrasi tidak dapat dipisahkan. Paradigma ini menentang paradigma sebelumnya yang menilai bahwa politik dan administrasi perlu dipisahkan. Selain itu, John Gaus dalam Keban (2014) menyatakan bahwa teori administrasi merupakan bagian dari teori politik. Oleh karena itu muncul paradigma baru yang menyoroti bahwa administrasi publik merupakan bagian dari ilmu politik yang lokus nya adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan fokus dari administrasi publik itu sendiri masih belum ditemukan karna banyak kekurangan pada prinsip-prinsip administrasi.

4. Paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956-1970)

Pada paradigma ini administrasi publik kehilangan identitasnya. Terjadi dua perkembangan dalam paradigma ini yaitu berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni dan yang berorientasi

pada kebijakan publik. Sebagai akibat dari dua perkembangan ini terjadi ketidakhelasan fokus dan lokus yang digunakan ilmu administrasi publik

5. Paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik (1970-sekarang)

Pada paradigma ini administrasi publik telah menjadi ilmu tersendiri yang titik fokus dan lokusnya telah tergambar dengan jelas. Fokus paradigma ini ialah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya ialah masalah-masalah dan kepentingan publik. Perbedaan paradigma ini dengan beberapa paradigma sebelumnya terletak pada kejelasan fokus dan lokusnya.

6. Paradigma *governance*

Paradigma tata kelola atau *governance* didefinisikan sebagai penerapan kekuasaan dan dominasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pada paradigma sebelumnya, adanya keterlibatan swasta dalam pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan membatasi kekuasaan pemerintah. Sedangkan dalam paradigma tata kelola atau *governance* selain ditujukan untuk mencapai efisiensi, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat dan pihak lainnya. Fokus dari paradigma keenam ini adalah peran aktif dan jaringan diluar pemerintahan dalam menghasilkan barang dan jasa publik

Berdasarkan paradigma-paradigma diatas, paradigma yang digunakan untuk penelitian mengenai pemetaan peran *stakeholder* adalah paradigma keenam, yaitu *governance*. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan pada

penelitian ini adalah untuk memetakan peran *stakeholder* dalam pengelolaan objek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini di Kabupaten Rembang

1.5.4 Manajemen Publik

Nicholas Henry (2010) mengungkapkan bahwa Manajemen publik adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam sektor publik untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dapat diimplementasikan dengan baik. George Frederickson (1980) mengemukakan teori manajemen publik yang dikenal dengan sebutan *New Public Administration* (NPA). Dalam teorinya, menekankan bahwa manajemen publik bukan hanya berkaitan dengan efisiensi administratif, tetapi juga dengan tujuan demokratisasi pemerintahan, keadilan sosial, dan penguatan peran masyarakat dalam proses pemerintahan.

Luther Gulick (1937) memperkenalkan konsep manajemen publik yang dikenal dengan istilah POSDCORB, yang merupakan singkatan dari tujuh fungsi manajerial utama yaitu, *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Staffing* (Perekrutan), *Directing* (Penuntunan/Pemimpinan), *Coordinating* (Koordinasi), *Reporting* (Pelaporan), *Budgeting* (Penganggaran). Sedarmayanti (2004) mengatakan bahwa Manajemen publik adalah upaya pengelolaan organisasi sektor publik dengan menerapkan prinsip good governance untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen Publik Menurut Shafritz dan Russel

(dalam Keban, 2008:93) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi. Menurut Yeremias T. Keban mengartikan manajemen publik sebagai upaya untuk menunjuk pada manajemen instansi pemerintah. Menurut Yeremias T. Keban mengartikan manajemen publik sebagai upaya untuk menunjuk pada manajemen instansi pemerintah. Owen E. Hughes (2003) dalam bukunya *Public Management and Administration* mengemukakan bahwa manajemen publik modern tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya publik, tetapi juga bagaimana menghubungkan tujuan pemerintah dengan pelayanan masyarakat yang efektif.

1.5.5 Identifikasi *Stakeholder*

Stakeholder adalah pihak yang memberikan pengaruh dan mendapatkan sebuah pengaruh terhadap suatu keputusan yang terjadi. *Stakeholder* juga dapat diartikan sebagai masyarakat maupun individu yang mempunyai kekuasaan, validasi, serta kepentingan terhadap suatu hal (Chandra, et al dalam Yovi, 2022) secara sederhana *stakeholder* dapat diartikan pihak yang dipengaruhi dan/atau mempengaruhi terhadap sebuah keputusan yang ada. *Stakeholders* merupakan suatu individu maupun kelompok yang dapat memberikan pengaruh atau diberi pengaruh di dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan (Fifiyanti, 2021) dalam Fahad et al., (2023).

Analisis *stakeholder* menurut Brown (Susilo et al., 2019) adalah usaha untuk menghimpun data mengenai siapa saja yang ikut andil dalam menentukan, menghimpun informasi, serta memberikan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ada sejumlah cara untuk melakukan analisis *stakeholder*. Tiga pendekatan umum untuk mendapatkan data dan sering digunakan adalah lokakarya, *focus group discussion* (FGD) dan *interview*. Apapun pendekatan yang digunakan, ada tiga langkah penting dalam analisis *stakeholders* yaitu: 1) mengidentifikasi *stakeholders* dan kepentingan masing masing, 2) menilai pengaruh, pentingnya dan tingkat dampak masing-masing *stakeholders* dan 3) mengidentifikasi cara terbaik untuk melibatkan para pemangku kepentingan (Devi, 2020).

Analisis *stakeholders* dapat melalui tiga langkah, yaitu identifikasi *stakeholders*, pengelompokkan dan pembeda antara *stakeholders*, serta memetakan hubungan antar *stakeholders* (reed et al., 2019). sedangkan menurut Ackerman dan Eden, dalam menganalisis *stakeholder* dapat dilakukan dengan menggunakan matriks pengaruh dan klasifikasi *stakeholder* (Bibin et al., 2018)

Klasifikasi *stakeholder* menurut Maryono (dalam Yosefita, 2015) mengklasifikasikan nya menjadi tiga, yaitu

1. *Stakeholder* Primer, yaitu *stakeholder* yang terkena dampak atau pengaruh secara langsung dan memiliki kepentingan yang pokok.

2. *Stakeholder* kunci, yaitu *stakeholder* yang memiliki kewenangan, pengaruh, dan kepentingan yang cukup penting secara legalitas dalam menentukan keputusan kebijakan (N.C. Hidayat et al., 2020)
3. *Stakeholder* sekunder, yaitu *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan secara langsung namun tetap berkaitan terhadap konteks yang terjadi.

Menurut David Viney dalam Yuniningsih (2019: 98) *stakeholders* adalah setiap orang yang terpengaruh oleh keputusan dan tertarik pada hasil dari keputusan tersebut, termasuk individu-individu, atau kelompok-kelompok atau keduanya baik didalam maupun diluar organisasi. *Stakeholders* mutlak diperlukan dalam organisasi publik guna memperlancar semua kegiatan.

Overseas Development Administration (ODA, 1995) Mengelompokkan *stakeholder* menjadi tiga kelompok, yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* sekunder, *stakeholder* kunci. Berdasarkan tiga pengelompokan tersebut *stakeholder* primer merupakan *stakeholder* dengan keterlibatan serta kepentingan secara langsung terkait suatu program maupun kebijakan yang bersangkutan. *Stakeholder* primer memiliki kewenangan memberikan pertimbangan dalam memutuskan suatu keputusan. *Stakeholder* primer memiliki dampak secara langsung terkait kebijakan yang sedang berjalan. *Stakeholder* pendukung atau sekunder merupakan *stakeholder* dengan kepedulian besar yang dimiliki atas program

atau kebijakan tersebut, namun tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap kebijakan maupun program tersebut. Kelompok individu yang termasuk dalam *stakeholder* sekunder tak jarang ikut memberikan suaranya apabila suatu program atau kebijakan tersebut akan memberikan dampak kepada masyarakat. Terakhir *stakeholder* kunci, yaitu individu maupun kelompok dengan kepentingan dan kewenangan yang cukup besar dalam menentukan suatu tindakan keputusan yang berkaitan dengan program atau kebijakan tersebut. *Stakeholder* kunci biasanya mencakup unsur pemerintahan. Berdasarkan penjelasan mengenai identifikasi aktor diatas, dapat disimpulkan bahwa identifikasi aktor adalah proses mengelompokkan aktor yang berperan dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan yang dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu primer, kunci, dan sekunder.

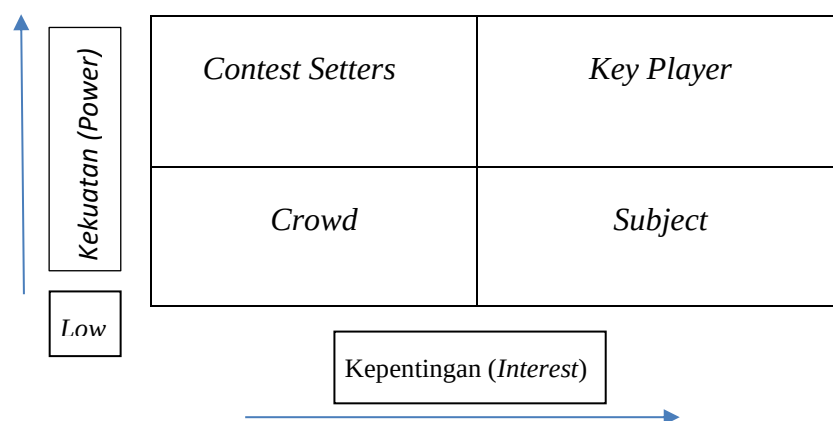
Pitana & Gayatri (2005) dalam Feronica (2020) mengelompokkan *stakeholder* sebagai pemerintah, pelaku usaha/swasta, dan masyarakat karena mereka memiliki peran dan fungsi yang berbeda. *Pentahelix* menurut Arif Yahya dalam Tri Yuningsih et al., (2019) adalah kolaborasi 5 (Lima Unsur) unsur subjek atau *stakeholder* pariwisata, yaitu : *Academician*, *Business*, *Community*, *Government* dan *Media*. Biasa disingkat ABCGM.

Freeman (1984) dan Murphy & Murphy (2004) dalam Feronica et al., (2020) menyatakan jika *stakeholder* adalah mereka yang memiliki kekuasaan dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mereka yang memberi dan/atau terkena dampak atas hasil keputusan

tersebut. Mereka bisa laki-laki atau perempuan, komunitas, kelompok sosial, atau lembaga. Sedangkan menurut (LANRI,2015) terdapat empat langkah yang bisa digunakan dalam proses analisis *stakeholder*, yaitu mengklasifikasikan aktor (minat dan kekuasaan), memetakan hubungan aktor (garis perintah, sumber dana, pemberian advice, arus informasi). Langkah ketiga memetakan pengaruh yang terjadi, dan langkah terakhir yaitu menganalisis aktor yang terlibat.

1.5.5 Peran *Stakeholder*

Kehadiran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan menjadi fundamental karena aktor atau *stakeholder* berperan dalam mempengaruhi dan dipengaruhi dalam proses pencapaian tujuan (freeman dalam bellastuti,2020). Bryson (dalam Hidayah et al., 2019) menyatakan bahwa dalam menganalisis peran *stakeholder* dapat dilakukan dengan memetakannya pada matrix dua kali dua yang dibedakan berdasarkan *interest* (minat) dan *power* (kekuasaan) yang dimiliki oleh setiap *stakeholder* dan berdampak terhadap permasalahan yang ada.



Marc J. Roberts (dalam kismartini,2017) menjelaskan bahwa keterlibatan aktor yang terlibat dalam implementasi dapat dilihat dari lima faktor, yaitu : kedudukan, perilaku, tujuan, motif dan sumberdaya. Menganalisis peran tiap *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan, menurut Nugroho (dalam Setiawan & Nurcahyanto, 2020) mengelompokkannya menjadi lima, yaitu :

1. *Policy creator*, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran dalam melakukan dan mengambil keputusan pada suatu kebijakan
2. Koordinator, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran dalam upaya koordinasi kepada *stakeholder* lain yang ikut berperan dalam proses kebijakan melalui proses kerjasama yang terjadi
3. Fasilitator, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran menyiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam proses implementasi tersebut, dan apasaja fasilitas yang diberikannya
4. Implementor, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan tersebut, dimana kelompok sasaran termasuk didalamnya
5. akselerator, yaitu *stakeholder* yang berperan dalam menunjang keberjalanan (kontribusi) suatu kebijakan yang dapat memberikan dampak mempercepat pelaksanaan dari target awal pencapaian.

Mengenai penjelasan tentang analisis peran *stakeholder* menurut beberapa ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis peran

stakholder adalah upaya menganalisis *stakeholder* yang berdasarkan perannya guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan dan dapat dilihat dari lima aspek, yaitu policy creator, koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator

1.5.5 Manajemen Pariwisata

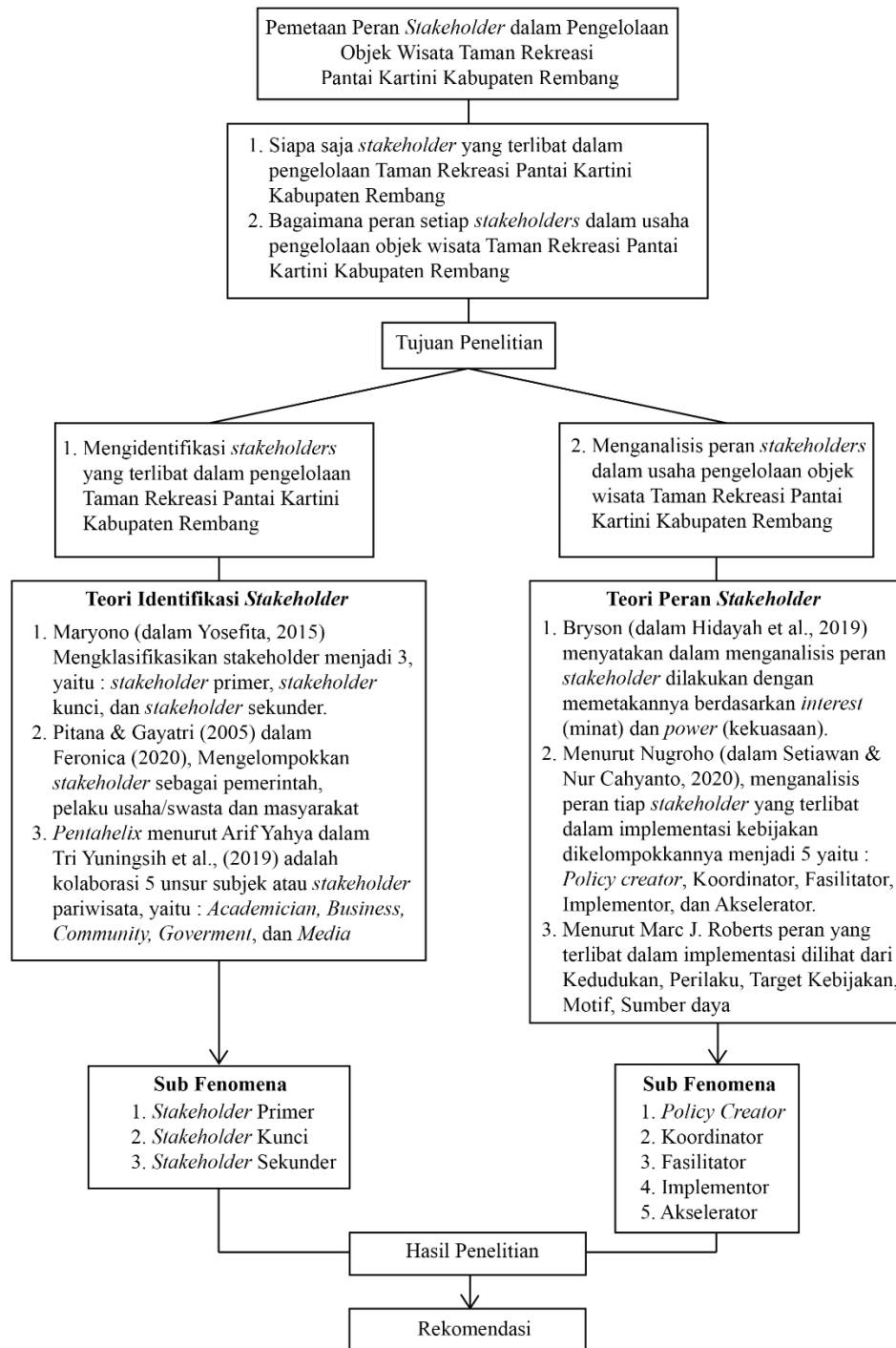
Suyanto (2011) mengemukakan bahwa pengelolaan destinasi pariwisata harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Menurut Nugroho (2009), manajemen pariwisata di Indonesia harus melibatkan berbagai pihak, baik itu pemerintah, masyarakat lokal, maupun sektor swasta untuk mengelola destinasi pariwisata secara bersama-sama. Stephen J. Page (2009) dalam bukunya *Tourism Management* menjelaskan bahwa manajemen pariwisata adalah proses merencanakan, mengelola, dan mengembangkan industri pariwisata dengan tujuan untuk mencapai keberlanjutan dan memaksimalkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi. Menurut Jhon Tribe (2009), manajemen pariwisata harus mempertimbangkan aspek ekonomi dalam setiap tahap pengembangan dan pengelolaannya. Ia menekankan pentingnya merencanakan dan mengelola pariwisata dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti permintaan pasar, analisis biaya-manfaat, serta dampak ekonomi terhadap masyarakat dan lingkungan lokal.

Menurut Pitana & Diarta (dalam Rudy & Mayasari, 2019) pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan special lokal sence yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
- b. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
- c. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis kepada keunikan budaya dan lingkungan lokal.
- d. Memberikan dukungan pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas dan nilai-nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal.

1.6 Kerangka Pemikiran Peneliti



Gambar 1. 6 Kerangka Pemikiran Peneliti

Sumber : Dianalisa penulis

1.7 Operasionalisasi Konsep

Stakeholder mencakup individu, organisasi, atau kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang memiliki kepentingan, berpartisipasi aktif, atau terkena dampak (baik positif maupun negatif) oleh kegiatan program pembangunan. *Stakeholder* dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategorisasi. Dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. *Stakeholder* Primer :

- *Stakeholder* yang terlibat langsung dalam pengelolaan objek wisata
- *Stakeholder* yang memiliki kepentingan langsung terhadap pengelolaan objek wisata
- *Stakeholder* yang memiliki kewenangan mempertimbangkan keputusan terhadap pengelolaan objek wisata
- *Stakeholder* yang terkena dampak langsung dalam pengelolaan objek wisata

2. *Stakeholder* Sekunder :

- *Stakeholder* yang memiliki kepedulian besar terhadap pengelolaan objek wisata
- *Stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap pengelolaan objek wisata
- *Stakeholder* yang ikut bersuara jika pengelolaan objek wisata berdampak kepada masyarakat

3. *Stakeholder* Kunci :

- *Stakeholder* yang memiliki kepentingan besar terhadap pengelolaan objek wisata
- *Stakeholder* yang memiliki kewenangan besar terhadap pengelolaan objek wisata
- *Stakeholder* yang menentukan bertanggung jawab terhadap keputusan dalam pengelolaan objek wisata

Peran dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ada karena suatu jabatan tertentu. Tugas, fungsi dan posisi serta kedudukan *stakeholder* berdasarkan peran yang dimiliki setiap *stakeholder* adalah :

a) *Policy Creator* :

- *Stakeholder* yang berperan mengambil keputusan terhadap pengelolaan objek wisata
- *Stakeholder* yang berperan menentukan kebijakan terhadap pengelolaan objek wisata

b) Koordinator :

- *Stakeholder* yang berperan menjadi koordinator utama terhadap pengelolaan objek wisata
- *Stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain dalam pengelolaan objek wisata
- *Stakeholder* yang berperan dalam proses pengelolaan objek wisata

c) Fasilitator :

- *Stakeholder* yang berperan menjadi fasilitator utama dalam pengelolaan objek wisata
- *Stakeholder* yang berperan menunjang kebutuhan terkait pengelolaan objek wisata
- *Stakeholder* yang berperan memberikan informasi terkait pengelolaan objek wisata

d) Implementor :

- *Stakeholder* yang berperan melaksanakan kebijakan terhadap pengelolaan objek wisata

e) Akselerator :

- *Stakeholder* yang berkontribusi terhadap pengelolaan objek wisata
- *Stakeholder* yang berperan mempercepat pelaksanaan pengelolaan objek wisata

1.8 Argumen Penelitian

Argumen penelitian membahas mengenai argumen atas jawaban dari perumusan masalah yang diangkat oleh peneliti berdasarkan kerangka teoritis yang dibangun oleh peneliti. Argumen penelitian ini didapat dari teori-teori yang tercantum dalam literatur yang ada. Berkaitan dengan permasalahan pengelolaan pada objek wisata taman rekreasi pantai kartini kabupaten rembang. Permasalahan-permasalahan yang timbul terhadap pengelolaan objek wisata dilakukan di kabupaten rembang yang cukup penting untuk dibahas. kondisi

objek wisata yang tidak baik menjadi faktor penting bahwa proses pengelolaan yang dilakukan pemerintah juga harus dapat berjalan dengan baik. pengelolaan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak

Identifikasi *stakeholder* yang berperan dalam segala proses pengelolaan objek wisata taman rekreasi pantai kartini ditentukan melalui tingkat kepentingan dan dampak yang dimiliki oleh setiap *stakeholder* yang ada. *Stakeholder* kunci dapat ditentukan apabila *stakeholder* tersebut memiliki kepentingan yang cukup penting secara legalitas dalam menentukan keputusan kebijakan. sedangkan *stakeholder* primer yaitu apabila *stakeholder* memiliki dampak secara langsung dan memiliki kepentingan yang pokok. Terakhir *stakeholder* sekunder ditemukan apabila *stakeholder* tersebut tidak memiliki kepentingan secara langsung namun tetap berkaitan terhadap konteks yang terjadi. Berdasarkan teori diatas, identifikasi *stakeholder* dalam pengelolaan taman rekreasi pantai kartini kabupaten rembang dapat ditemukan

Tahap yang selanjutnya dilakukan setelah peneliti dapat mengidentifikasi *stakeholder*, yaitu mengetahui peran yang dimiliki oleh setiap *stakeholder* yang terlibat. Peran *stakeholder* tersebut dapat dibedakan menjadi lima, yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator. Singkatnya, *policy creator* yaitu *stakeholder* yang berperan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan suatu isu yang ada, koordinator yaitu *stakeholder* yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi antar *stakeholder* yang terlibat, fasilitator yaitu *stakeholder* dengan peran memberikan fasilitas

yang dapat menunjang keberhasilan suatu kegiatan, dan terakhir akselerator yaitu *stakeholder* yang memiliki peran dalam melakukan hal-hal yang dapat mempercepat proses kebijakan tersebut. Melalui analisis peran *stakeholder* ini, permasalahan yang muncul terhadap suatu implementasi kebijakan dapat terlihat dan kemudian untuk dilakukan perbaikan agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Secara umum penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs Penelitian menempatkan tempat atau wilayah dimana peneliti akan dilaksanakan. Lokasi atau wilayah yang diambil dalam penelitian ini adalah Taman Rekreasi Pantai Kartini, Jl. Jend. Sudirman No.83, Rembangan, Tasikagung, Kecamatan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59211.

1.9.3. Subjek Penelitian

Tabel 3.1 Profil Informan

Informan	Jabatan
Informan 1 : Catur Setyo N, SE, MM	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang
Informan 2 : Afief Firmandha Hatna, S.Kom., M.M.	Kabid Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang
Informan 3 : Naily Faliziah, S.Si	Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang
Informan 4 : Ali	Staff Bidang Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
Informan 5 : Muhammad Mahfudz, SH, MH	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang
Informan 6 : Moch. Satriyo Wibisono, S.H	Sekretaris SATPOL PP Kabupaten Rembang
Informan 7 : Drs. Drupodo, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang
Informan 8 : Drs. Dwi Martopo	Kepala Dinas Ketenagaan Kerja Kabupaten Rembang
Informan 9 : Wahyu Hari Prasetyo, S.E	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Sumber : Peneliti (2024)

Subjek penelitian dalam hal ini adalah individu atau kelompok yang diharapkan peneliti dapat menceritakan apa yang ia ketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau kasus yang diteliti atau dengan kata lain dapat disebut sebagai informan. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive. Dimana teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono;2017:85).

Tabel 1. 3 Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati	Informan
1	Identifikasi Stakeholder	Stakeholder Primer	- Stakeholder yang terlibat langsung dalam pengelolaan objek wisata - Stakeholder yang memiliki kepentingan langsung terkait pengelolaan objek wisata - Stakeholder yang memiliki kewenangan mempertimbangkan keputusan pengelolaan objek wisata - Stakeholder yang terkena dampak langsung dalam pengelolaan objek wisata	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang
		Stakeholder Sekunder	- Stakeholder yang memiliki kepedulian besar terhadap pengelolaan objek wisata - Stakeholder yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap pengelolaan objek wisata - Stakeholder yang ikut bersuara jika pengelolaan objek wisata berdampak kepada masyarakat	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang - Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Rembang - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

		<i>Stakeholder Kunci</i>	- <i>Stakeholder</i> yang memiliki kepentingan besar terhadap pengelolaan objek wisata - <i>Stakeholder</i> yang memiliki kewenangan besar terhadap pengelolaan objek wisata - <i>Stakeholder</i> yang bertanggung jawab terhadap keputusan dalam pengelolaan objek wisata	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang - Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Rembang
2.	Peran <i>Stakeholder</i>	<i>Policy Creator</i>	- <i>Stakeholder</i> yang berperan mengambil keputusan terhadap pengelolaan objek wisata - <i>Stakeholder</i> yang berperan menentukan kebijakan terhadap pengelolaan objek wisata	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang - Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Rembang
		Koordinator	- <i>Stakeholder</i> yang berperan menjadi koordinator utama terhadap pengelolaan objek wisata - <i>Stakeholder</i> yang berperan mengkoordinasikan <i>stakeholder</i> lain dalam pengelolaan objek wisata - <i>Stakeholder</i> yang berperan dalam proses pengelolaan objek wisata	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang
		Fasilitator	- <i>Stakeholder</i> yang berperan menjadi fasilitator utama dalam pengelolaan objek wisata - <i>Stakeholder</i> yang	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang - Dinas Pekerjaan

			berperan menunjang kebutuhan terkait pengelolaan objek wisata - <i>Stakeholder</i> yang berperan memberikan informasi terkait pengelolaan objek wisata	Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang
		Implementor	- <i>Stakeholder</i> yang berperan melaksanakan kebijakan terhadap pengelolaan objek wisata	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang
		Akselerator	- <i>Stakeholder</i> yang berkontribusi terhadap pengelolaan objek wisata - <i>Stakeholder</i> yang berperan mempercepat pelaksanaan pengelolaan objek wisata	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

1.9.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat deskriptif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data yaitu, wawancara dan analisis dokumen serta gambar yang diperoleh melalui dokumentasi atau pemotretan.

1.9.5 Sumber Data

Penelitian dengan judul pemetaan peran *stakeholder* dalam pen-
objek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang ini
memperoleh data dari :

1. Data Primer

Data primer didapatkan secara langsung dengan observasi langsung
kelapangan dan wawancara mendalam dengan informan yang telah
memberikan informasi mengenai *stakeholder* yang terkait dalam
pengelolaan di objek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini
Kabupaten Rembang

2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari artikel berita seperti, Radar Kudus,
Jateng Report, Radio R2B dan lainnya. studi dokumen seperti Buku
Saku Pariwisata, Statistik Jumlah Kunjungan Wisatawan, Peraturan
Pemerintah daerah dan modul Taman Kartini serta jurnal-jurnal
yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yakni
sebagai berikut :

1. Wawancara

Penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan secara terstruktur yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara atau *interview guide* yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fenomena penelitian yang diteliti.

2. Observasi

Observasi pada penelitian ini dilaksanakan langsung dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi Taman Rekreasi Pantai Kartini dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari, menganalisis, dan memahami literatur dari dokumen, arsip-arsip, dan laporan kegiatan yang ada di Buku Saku Pariwisata, Statistik Jumlah Kunjungan Wisatawan, Peraturan Pemerintah daerah dan modul Taman Kartini, artikel dari Radar Kudus, Jateng Report, Radio R2B ataupun informasi dari jurnal lainnya.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data Analisis (Miles dan Huberman,1992)

1. Pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam memperoleh data yang akan diperlukan berdasarkan hasil dari wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi dokumen

2. Reduksi data dilakukan apabila proses pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis catatan, dan lain sebagainya dengan tujuan menyeleksi data atau informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.
3. Uji keabsahan adalah proses pengujian keberadaan atau keabsahan dengan menggunakan uji kredibilitas data yang digunakan dengan menggunakan teknik triangulasi.
4. Penyajian data menggunakan bentuk uraian singkat berupa tabel, grafik, dan lain sebagainya sehingga mempermudah dalam memahami fenomena yang terjadi dalam penyusunan rencana kerja.
5. Penarikan kesimpulan yang dilakukan bersifat temporal, data yang diperoleh telah dianalisis kemudian dijelaskan dan diartikan dalam bentuk kalimat-kalimat dengan tujuan untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan keterangan tersebut pada setiap tahapan dalam proses penelitian yang digunakan untuk mendapatkan keabsahan data dengan mempelajari seluruh data yang ada melalui berbagai sumber yang didapatkan dari lapangan dan dokumentasi melalui metode wawancara dan observasi.

1.9.8 Kualitas Data

Menurut William dan Wiersma dalam Sugiyono (2016:372-374) menjelaskan bahwa triangulasi adalah suatu proses cek data yang berasal

dari sumber, cara, dan waktu. Tiga cara dalam proses triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, yaitu :

1. Triangulasi sumber adalah proses uji validitas data melalui sumber yang berbeda.
2. Triangulasi teknik adalah uji kredibilitas data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda, seperti wawancara kemudian dilakukan sinkronisasi studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi.
3. Triangulasi waktu adalah uji data menggunakan sumber yang sama dengan waktu yang berbeda.

Pengujian validasi data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Sumber informasi diperoleh lebih tidak hanya dari satu informan saja, namun dapat menggunakan sumber data berupa dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan wawancara lebih dari satu sumber yang memiliki sudut pandang berbeda.